

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sektor pendidikan kini telah berada pada era globalisasi yang sesungguhnya, dimana informasi dan komunikasi yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang mengakibatkan persaingan ketat, untuk itu kemajuan suatu bangsa sangatlah penting terutama dalam hal mutu pendidikan. Dalam mengimbangi perkembangan jaman hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia di Indonesia.

Terdapat berbagai jenis pendidikan di Indonesia yang mempunyai daya dukung yang sangat besar terutama untuk membantu perkembangan masyarakat yang kurang mampu yaitu jenis pendidikan nonformal. Menurut Coombs (dalam Sudjana, 2010, hlm.21) Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar system persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Pendidikan non-formal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Banyak sekali upaya pemerintah dalam mendukung hal tersebut yaitu salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 26 ayat 4 menjelaskan bahwa satuan PNF antara lain lembaga kursus dan lembaga pelatihan, dan ayat 5 menegaskan bahwa lembaga kursus dan pelatihan diberikan agar peserta didik mampu mengembangkan diri, profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu kembali diperlengkap dalam pasal 103 ayat (1) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa kursus dan

pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus. Definisi pelatihan diuraikan menurut Simamora (dalam Kamil, 2012, hlm.4) pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengasah atau meningkatkan keterampilan yang dimiliki seseorang agar kemampuan yang dia miliki dapat berkembang.

Program-program yang dapat diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat (2) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah antara lain sebagai berikut: a) pendidikan kecakapan hidup, b) pendidikan kepemudaan, c) pendidikan pemberdayaan perempuan, d) pendidikan keaksaraan, d) pendidikan keterampilan kerja, e) pendidikan kesetaraan dan/atau f) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. Banyak yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan dukungan agar masyarakat mempunyai kemampuan yang lebih baik salah satunya yaitu dengan diberlakukannya akreditasi pada program lembaga kursus.

Dibuktikan dengan adanya Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 yang berbunyi (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi adalah salah satu usaha tuntutan pembaharuan sistem pendidikan untuk mencapai sekolah yang berkualitas, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Selain itu penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan

keadilan; dan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. Tujuan akreditasi kursus adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan LKP atas dasar standar Nasional pendidikan dengan kriteria yang bersifat terbuka. Manfaat dari akreditasi antara lain untuk meningkatkan mutu program dan satuan pendidikan LKP, sebagai umpan balik dalam memberdayakan dan mengembangkan kinerja LKP serta membantu pemerintah mendapatkan informasi agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada LKP. Dengan adanya akreditasi ini, maka dapat mendorong LKP agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana dan kompetitif di tingkat kota/kabupaten, Provinsi, Nasional dan bahkan Internasional.

Lembaga kursus dan pelatihan non formal memiliki kelayakan program dan setara dengan pendidikan formal, maka lembaga tersebut harus mendapat akreditasi dari BAN PAUD dan PNF. Untuk mengupayakan hal tersebut BAN PAUD dan PNF juga memberikan sosialisasi terhadap lembaga-lembaga yang belum terakreditasi agar lembaga tersebut mendapatkan akreditasi. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah memfasilitasi agar lembaga-lembaga kursus di kota Bandung dapat diberikan sosialisasi secara merata, dengan begitu pengelola dapat termotivasi dalam melaksanakan akreditasi.

Apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah mengenai diadakannya kebijakan pendidikan nonformal tentunya tidak lepas dari permasalahan yang telah terjadi sebelumnya yang terkait dengan program tersebut. Keberadaan lembaga kursus dan pelatihan telah memberi sumbangan positif bagi upaya mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Begitupun di kota Bandung sendiri telah banyak lembaga yang berdiri tetapi masih banyak lembaga yang masih belum terakreditasi. Dari data lembaga Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk 390 lembaga kursus di mulai tahun 2014 sampai 2016 hanya 51 berarti hanya 13% saja lembaga kursus yang baru terakreditasi. Banyak kendala yang dihadapi yaitu salah

satunya kurangnya kesadaran dari pengelola lembaga kursus untuk dapat berusaha agar lembaganya mempunyai akreditasi terutama dalam menempuh prosesnya.

Kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan non formal yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan seiring dengan tuntutan tersebut maka lembaga kursus dan pelatihan semakin dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, dan pada akhirnya hanya lembaga kursus dan pelatihan yang bermutu yang dapat diterima masyarakat dan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional.

Berdasarkan hasil observasi tersebut penulis belum mengetahui apakah sosialisasi akreditasi lembaga kursus dan pelatihan berpengaruh terhadap motivasi pengelola untuk melaksanakan akreditasi program pada lembaga. Adapun fokus penelitian yang penulis ingin ajukan adalah “ Pengaruh Sosialisasi Program Akreditasi Kursus Terhadap Motivasi Pengelola Untuk Menyiapkan Akreditasi Program Pada Satuan Pendidikan LKP Di Kota Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil studi eksplorasi yang dilakukan peneliti, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kota Bandung masih banyak yang belum terakreditasi diperkuat dengan adanya data dari dinas setempat bahwa dari 100 % lembaga baru 13 % saja yang telah terakreditasi.

2. Rendahnya motivasi pengelola lembaga kursus di Kota Bandung dalam mengikuti administrasi ditandai dengan data lembaga kursus dan pelatihan yang masih belum terakreditasi yaitu dari 390 hanya 51 lembaga saja yang sudah mengikuti akreditasi.
3. Adanya kegiatan sosialisasi program akreditasi kursus dari BAN PAUD dan PNF yang diselenggarakan di Kota Bandung ditandai dengan data lembaga dinas setempat bahwa kegiatan sosialisasi diadakan 2 sampai 3 kali dalam satu tahun.
4. Regulasi yang dianggap cukup rumit oleh pengelola sehingga rendahnya motivasi untuk akreditasi.

Maka rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh sosialisasi program akreditasi kursus terhadap motivasi pengelola untuk menyiapkan akreditasi program di Kota Bandung?” untuk menjabarkan rumusan masalah penelitian diatas maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan sosialisasi program akreditasi pada lembaga kursus di Kota Bandung?
2. Bagaimana motivasi pengelola kursus untuk menyiapkan akreditasi program?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi program akreditasi kursus terhadap motivasi pengelola untuk menyiapkan akreditasi program pada satuan pendidikan LKP?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi program akreditasi terhadap motivasi pengelola kursus. Sedangkan secara khusus tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kegiatan sosialisasi program akreditasi pada lembaga kursus di Kota Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan motivasi pengelola kursus untuk menyiapkan akreditasi program.

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh kegiatan sosialisasi program akreditasi kursus terhadap motivasi pengelola untuk menyiapkan akreditasi program pada satuan pendidikan LKP.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat konseptual, teoritis, dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sebuah kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu Pendidikan Nonformal serta sebagai referensi penelitian yang mungkin akan dilaksanakan mengenai Pengaruh sosialisasi program akreditasi kursus terhadap motivasi pengelola untuk menyiapkan akreditasi program pada satuan pendidikan LKP di Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap kegiatan sosialisasi akreditasi dapat memberikan kontribusi untuk membantu pengelola LKP dalam menyiapkan akreditasi program serta khususnya dapat memberikan motivasi agar pengelola bisa melaksanakan proses akreditasi program.

#### **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Penelitian ini disusun kedalam IV (lima) bab berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah (Direktur Kemahasiswaan, 2016) yang berisi mengenai:

**Bab I** : Menguraikan pendahuluan yaitu meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari segi teori,

kebijakan dan praktik dan struktur organisasi skripsi yang dirancang berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Indonesia.

**Bab II** : Menguraikan mengenai kajian pustaka yang berisi landasan teoritis dan kajian teoritis, yakni konsep yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian yang terdiri dari, konsep mekanisme akreditasi, konsep kursus dan pelatihan, konsep inovasi, konsep sosialisasi dan komunikasi, konsep penyuluhan, konsep motivasi, serta konsep pendidikan orang dewasa.

**Bab III** : Menguraikan pembahasan mengenai metode penelitian yang telah diuraikan dalam penelitian, berisi tentang Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Prosedur pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

**Bab IV** : Menguraikan pembahasan mengenai pengolahan data dan pembahasan hasil temuan penelitian yang di dapat oleh peneliti di tempat penelitian tersebut.

**Bab V** : Menguraikan mengenai simpulan dan rekomendasi terhadap hasil temuan penelitian.